



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : R. RUDI BARMARA
- Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK : 102616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.132.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/95 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/93 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
- Tanah Seluas 7637 m2 di KOTA TASIKMALAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 382.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

- MOBIL, TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO 1500CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.230.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.864.060

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.298.094.060

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.298.094.060

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.